

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN NATUNA



2020



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN NATUNA



2020

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN NATUNA
2020**

ISBN: 9786239454616

No. Publikasi: 21030.2104

Katalog: 4102002.2103

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xii + 44 hal

Naskah:

BPS Kabupaten Natuna

Penyunting:

BPS Kabupaten Natuna

Desain Cover oleh:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Sumber Ilustrasi Cover:

Freepik.com

Diterbitkan oleh:

©BPS Kabupaten Natuna

Dicetak oleh:

Percetakan Rizky Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna 2020

Penanggungjawab Umum:

Wahyu Dwi Sugianto

Penyunting:

Arlita Gariana

Naskah:

Lia Oktavera

Pengolah Data:

Lia Oktavera

Gambar Kulit dan Tata Letak:

Arlita Gariana

<https://natunabps.go.id>



KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pada masa pandemi Covid-19 yang datang di tahun 2020 membawa dampak pada kehidupan manusia, tak terkecuali capaian pembangunan manusia. Indonesia salah satu negara yang terkena dampak ini. Tetapi, IPM Indonesia 2020 masih bisa tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya juga PM Kabupaten Natuna tahun 2020. Tantangan perlambatan pertumbuhan IPM pada masa pandemi COVID-19 utamanya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Data dan informasi pembangunan manusia Kabupaten Natuna yang tersaji dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam menyusun strategi dan mengupayakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna Tahun 2020". Semoga upaya yang telah dibangun bersama ini membawa manfaat untuk mendukung perwujudan manusia Natuna yang semakin berkualitas, produktif, berdaya saing dan sejahtera.

Ranai, Juli 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna

Wahyu Dwi Sugianto

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
1. BAB I. Pengukuran Pembangunan Manusia	
1.1 Perkembangan Pengukuran Pembangunan	3
1.2 Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia	5
1.3 Mengukur Pembangunan Manusia	7
1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	8
2. BAB II. Capaian Pembangunan Manusia di Indonesia	
2.1 Pembangunan Manusia di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID	11
2.2 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Tumbuh Melambat	13
2.3 Capaian Dimensi Pengetahuan Tumbuh Melambat	14
2.4 Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Terdampak Pandemi	16
3. BAB III. Capaian Pembangunan Manusia di Natuna	
3.1 Pembangunan Manusia di Kabupaten Natuna	19
3.2 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Natuna.....	20
3.3 Capaian Dimensi Pengetahuan Natuna	24
3.4 Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Natuna.....	28
4. BAB IV. Kesimpulan	35
Pustaka dan Lampiran	39

DAFTAR TABEL

L. LAMPIRAN

L.1	Indikator Terkait Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten Natuna, 2019-2020	40
L.2	Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Perhitungan Paritas Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>	43

<https://natunakab.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, 2010-2020..... 12
2.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Indonesia (UHH), 2010-2020... 13
2.3	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Indonesia, 2010-2020..... 14
2.4	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia, 2010-2020..... 15
2.5	Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan di Indonesia, 2010-2020 16
3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Natuna, 2010-2020 20
3.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Natuna, 2010-2020..... 21
3.3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan..... 22
3.4	Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Natuna, 2017-2020 22
3.5	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Natuna, 2018-2020 23
3.6	Wanita Pernah Kawin dengan Umur Kawin Pertama \leq 16 Tahun di Kabupaten Natuna, 2017-2020 24
3.7	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Natuna, 2010-2020..... 25
3.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Natuna Menurut Kelompok Usia Sekolah (persen), 2019-2020 26
3.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Natuna Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2019-2020 27
3.10	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Natuna Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2019-2020 27
3.11	Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan di Kabupaten Natuna (000 Rp), 2010-2020..... 28

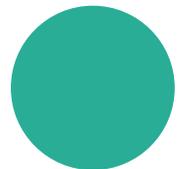
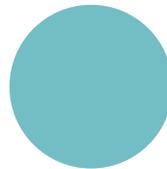
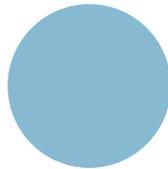
3.12	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Natuna, 2010-2020.....	29
3.13	Status Pekerjaan Utama Menurut Pekerja Formal dan Informal di Kabupaten Natuna (persen), 2019-2020.....	30
3.14	Tren Kemiskinan di Kabupaten Natuna, 2010-2020.....	31

<https://natunakab.bps.go.id>



BAB 1

Pengukuran Pembangunan Manusia



<https://natunakab.bps.go.id>

BAB I

PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1. PERKEMBANGAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN

Sebelum tahun 1970, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Simth, 2003). Perhatian dunia tertuju pada diskusi tentang pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin adanya perbaikan taraf hidup Sebagian besar penduduk. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia.

Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memang sebuah ukuran yang penting dalam pembangunan. Namun, kedua indikator tersebut belum menjelaskan fakta bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, angka pendapatan nasional memang bermanfaat untuk banyak tujuan tetapi tidak mengungkapkan komposisi penduduk atau penerima manfaat nyata. Kedua, penilaian kinerja yang hanya mendasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi kerja yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.

Menjelang tahun 1990, perhatian dunia berubah dari pembangunan ekonomi menjadi pembangunan manusia. Dunia internasional mulai menyadari bahwa manusia merupakan input sekaligus menjadi tujuan dalam pembangunan. Hal ini muncul karena beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga disertai dengan tingginya pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia.

Tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) menerbitkan laporan untuk menanggapi isu yang sedang berkembang pada saat itu. Dalam laporan yang berjudul Human Development Report (HDR) 1990, UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Laporan HDR edisi pertama tersebut secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus menjadi input pembangunan.

Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP memberikan nuansa baru dalam memahami pembangunan. Cara pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain: Pertumbuhan PDB merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan PDB saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun PDB atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi, atau sebaliknya.

Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Keduanya hanya berfokus dengan sisi penawaran, dimana manusia dipandang sebagai alat untuk memajukan produksi komoditas. Hal ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat karena manusia adalah agen aktif dari kegiatan produksi. Akan tetapi, manusia memiliki nilai lebih dari barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.

Pendekatan kesejahteraan masyarakat memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai peserta di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.



Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaa barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

1.2. PERKEMBANGAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Laporan Human Development Report yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tidak hanya memuat konsep dan definisi dari pembangunan manusia tetapi juga bagaimana melakukan pengukuran pembangunan manusia. Konsep pengukuran pembangunan manusia yang dibuat oleh UNDP disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak tahun 1990 IPM dipublikasikan secara berkala oleh UNDP dalam laporan tahunan HDR. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam bentuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lain dalam kehidupan.

Pada HDR 1990 diperkenalkan tiga dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut diwakili dengan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan metode rata-rata aritmatik.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010 UNDP melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam penghitungan IPM dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama tetapi merubah indikator yang digunakan, yaitu: agregasi Angka Melek Huruf (AMH) dan kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi agregasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selain perubahan pada indikator, UNDP juga merubah penghitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik, sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan bahwa suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar.

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi dijadikan indikator perkembangan pendidikan karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar negara sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarnegara dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, indikator yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indeks komposit menjadi tidak relevan, sehingga indikator AMH perlu diganti dengan indikator lain yang representatif.

Indikator berikutnya yang diganti adalah PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang turut menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri dalam penghitungan. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sementara itu, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan. Penggunaan rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah (BPS, 2015), sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik. IPM metode baru yang disempurnakan pada tahun 2014 memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya adalah:

menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik; penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya; penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; menggunakan rata-rata geometrik yang tidak serta merta dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimensi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik diperlukan keseimbangan antar dimensi yang sama pentingnya.

Penghitungan IPM di Indonesia dimulai pada tahun 1996. Saat itu IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun sekali. Namun sejak tahun 2004, IPM dihitung secara berkala setiap tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, terutama dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Metode baru penghitungan IPM diaplikasikan di Indonesia sejak



tahun data 2014 dan untuk memenuhi ketersediaan akan data tahun sebelumnya dilakukan backasting untuk periode data 2010-2013.

1.3. MENGUKUR PEMBANGUNAN MANUSIA

Pengukuran dan monitoring pembangunan manusia dapat mencakup banyak variabel agar memberikan gambaran yang komprehensif. Namun, terlalu banyak variabel juga dapat memberikan gambaran yang membingungkan. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lain dalam kehidupan.

Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (decent standard of living).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Pentingnya harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor tidak langsung yang berkaitan erat dengan harapan hidup (seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan untuk kehidupan produktif dalam masyarakat modern. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah penguasaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, mengingat tidak semua wilayah di Indonesia memiliki indikator tersebut, maka

dipilih alternatif lain dengan memanfaatkan indikator pendapatan/pengeluaran. Indikator ini tersedia hingga level wilayah kabupaten/kota. Pertimbangan lebih lanjut adalah bahwa indikator tersebut harus mencerminkan diminishing return untuk mengubah pendapatan/pengeluaran menjadi kemampuan manusia. Dengan kata lain, manusia tidak perlu sumber daya keuangan yang berlebihan untuk memastikan kehidupan yang layak. Aspek ini diperhitungkan dengan menggunakan logaritma pengeluaran perkapita yang mencerminkan indikator pendapatan.

1.4. MANFAAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Sejak tahun 2014 angka IPM di Indonesia disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM secara periodik menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia di daerahnya, baik capaian, kecepatan, posisi, maupun disparitas antardaerah. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

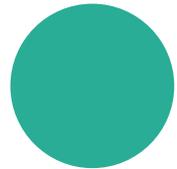
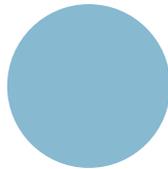
sangat tinggi	: $IPM \geq 80$
tinggi	: $70 \leq IPM < 80$
sedang	: $60 \leq IPM < 70$
rendah	: $IPM < 60$

Manfaat lain dari IPM adalah sebagai salah satu indikator target pembangunan dan salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai salah satu indikator dalam pengalokasian DID.



BAB 2

Capaian Pembangunan Manusia Indonesia



<https://natunakab.bps.go.id>

BAB II

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Akibatnya Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya disebabkan oleh penurunan output kegiatan ekonomi yang proses produksi dan transaksinya banyak melibatkan interaksi langsung dan menimbulkan kerumunan.

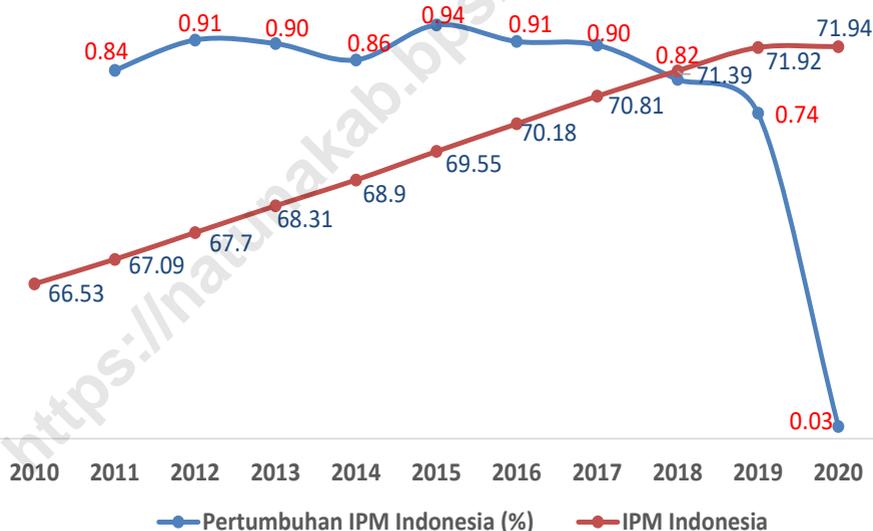
Pandemi Covid-19 yang secara resmi dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal Maret, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi. Pandemi ini memukul perekonomian nasional secara umum. Tidak dapat dipungkiri hantaman Covid-19 ini juga akan menggoyang capaian pembangunan yang sudah ada, termasuk Indeks Pembangunan Manusia.

2.1. PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19. Pandemi covid-19, virus yang sudah berkembang di Cina ini mewabah ke berbagai negara termasuk Indonesia telah menekan seluruh aspek kehidupan manusia. Kegiatan pendidikan yang sebelum pandemi dilakukan dengan tatap muka, sekarang dilakukan dengan virtual. Pemberian beberapa layanan kesehatan yang bersifat konsultatif sebagian besar juga dilaksanakan melalui komunikasi telepon atau secara daring. Transaksi langsung dan kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan kerumunan juga banyak dihindari.

Seluruh indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM. Pada tahun 2020 IPM Indonesia mencapai 71,94, tumbuh sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Indonesia masih berada pada level tinggi (berada pada kisaran antara $70 \leq \text{IPM} < 80$). Pertumbuhan IPM tahun 2020 jauh melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74 persen (Gambar 2.1). Selama periode 2010-2019, pembangunan manusia di Indonesia setiap tahunnya rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Tetapi dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yang melambat tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2020 menjadi sebesar 0,78 persen per tahun.

Gambar 2.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perlambatan IPM di masa pandemi COVID ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

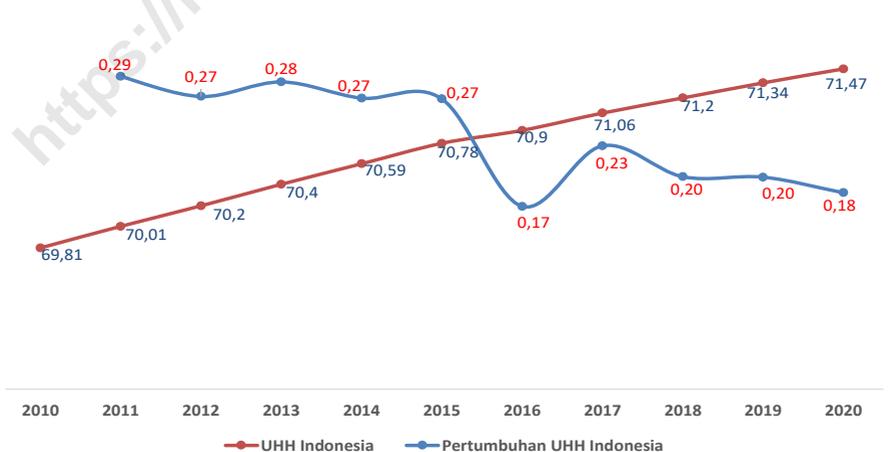


2.2. CAPAIAN DIMENSI UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT TUMBUH MELAMBAT

Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat di Indonesia secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini juga mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahun, sedangkan Umur Harapan Hidup (UHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2020 capaian UHH Indonesia adalah 71,47 tahun atau meningkat 0,18 persen (0,13 tahun) dibandingkan tahun 2019. Walaupun terjadi peningkatan UHH, tetapi terjadi sedikit perlambatan dibandingkan 3 tahun sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 0,23 persen (0,16 tahun), 0,20 persen (0,14 tahun), dan 0,20 persen (0,14 tahun).

Gambar 2.2. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Indonesia, 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

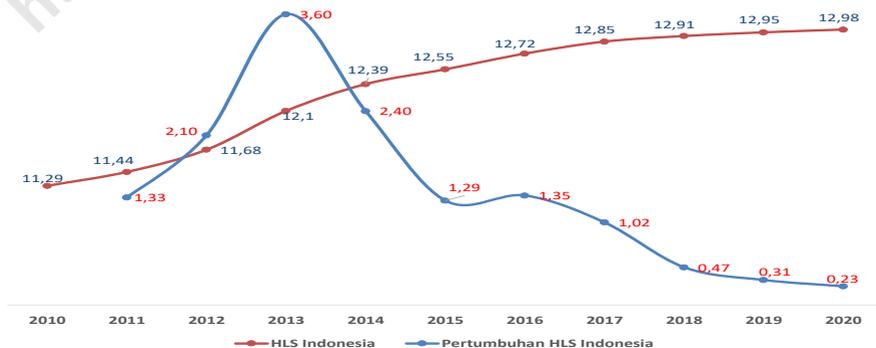
2.3. CAPAIAN DIMENSI PENGETAHUAN TUMBUH MELAMBAT

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM terdiri dari dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS adalah perkiraan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak yang berumur 7 tahun. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Sementara itu, RLS adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk untuk RLS adalah penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa proses pendidikan seseorang sudah berakhir sebelum mencapai umur 25 tahun. Penghitungan RLS berdasarkan penduduk yang berumur 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

HLS merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang. HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang penambahan (flow) dan capaian (stock) kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Selama tahun 2010 hingga 2020, kedua indikator ini selalu mengalami peningkatan. Meskipun HLS terus meningkat, tetapi sejak tahun 2014 cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2020 HLS hanya meningkat 0,23 persen (0,03 tahun), sedikit lebih lambat dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya yang mencapai 0,31 persen (0,04 tahun) (Gambar 2.3).

Gambar 2.3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Indonesia, 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator RLS di masa pandemi juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020 atau meningkat 1,68 persen (0,14 tahun). Peningkatan ini lebih lambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,08 persen (0,17 tahun).

Gambar 2.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia, 2010-2020

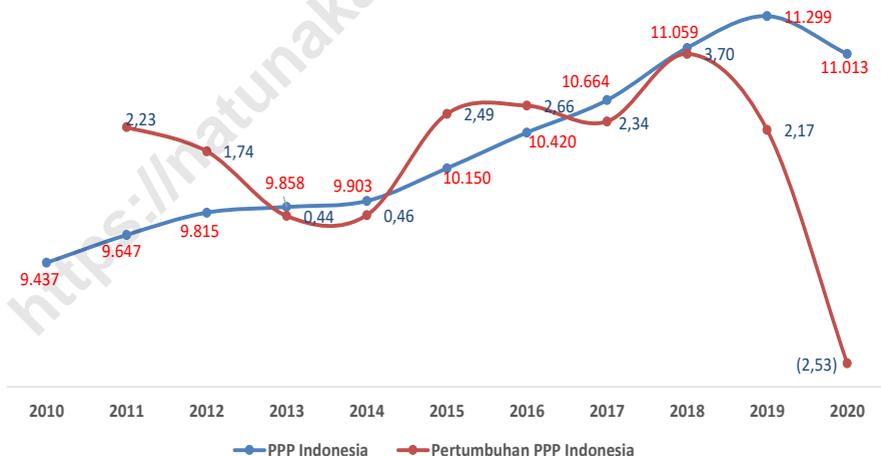


Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4. CAPAIAN DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK TURUN TERDAMPAK PANDEMI

Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Selama tahun 2010-2019, indikator ini selalu tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,02 persen per tahun, tetapi pada periode 2010-2020 turun menjadi 1,73 persen per tahun akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan adalah sebesar Rp11.013.000, terkontraksi 2,53 persen (turun Rp286.000) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 yang sebesar Rp11.059.000 (Gambar 2.5).

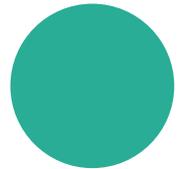
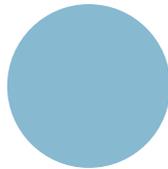
Gambar 2.5. Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan di Indonesia, 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB 3

Capaian Pembangunan Manusia Natuna



<https://natunakab.bps.go.id>

BAB III

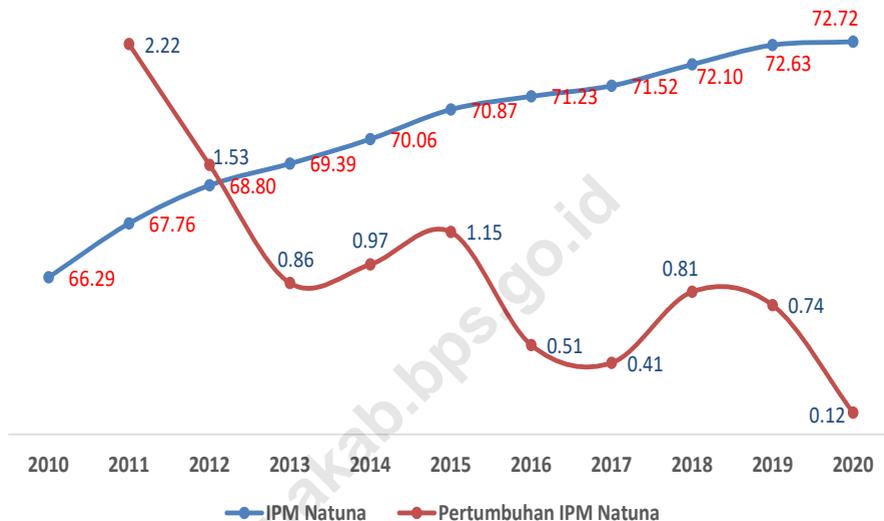
CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN NATUNA

3.1. PEMBANGUNAN MANUSIA NATUNA

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Natuna meningkat dari 66,29 pada tahun 2010 menjadi 72,63 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Natuna rata-rata tumbuh sebesar 1,02 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2014. Semenjak adanya pandemi COVID-19 membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Natuna. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 72,72 atau tumbuh 0,12 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010–2020 menjadi sebesar 0,93 persen per tahun.

Perlambatan pertumbuhan IPM 2020 di masa pandemi COVID ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna, 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

3.2. CAPAIAN DIMENSI UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT NATUNA

Terkait dimensi umur panjang dan hidup sehat yang ditandai dengan indikator angka harapan hidup saat lahir direpresentasikan sebagai dimensi umur panjang dan hidup sehat. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) selama periode 2010 hingga 2020 telah meningkat sebesar 3,09 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Natuna adalah 61,97 tahun, dan pada tahun 2020 mencapai 65,06 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Kabupaten Natuna tahun 2020 mengalami tetap tumbuh. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Natuna tumbuh 0,39 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan selama tahun 2018–2019 yang masing-masing mencapai 0,37 persen.

Sementara itu angka morbiditas adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi angka morbiditas menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk karena semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan



kesehatan. Hal ini mengindikasikan masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai sebab. Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada angka mortalitas dan umur harapan hidup.

Berdasarkan Susenas 2020 bulan Maret, angka morbiditas penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2020 adalah 11,14 persen. Angka tersebut turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 13,42 persen (Tabel 3.1). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Natuna pada saat itu semakin membaik dalam satu tahun terakhir.

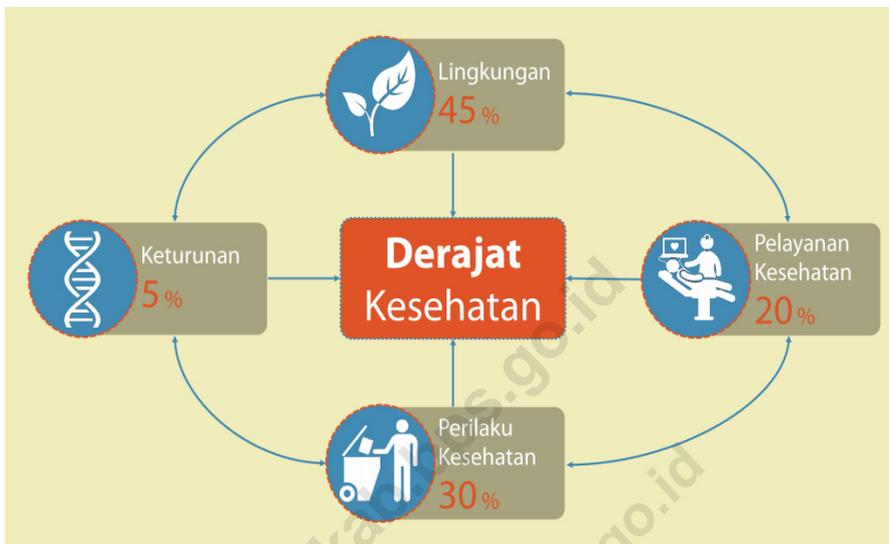
Gambar 3.2. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Natuna, 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodihardjo dkk, 1997). Faktor lingkungan mempunyai pengaruh sebesar 45 persen, perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan keturunan sebesar 5 persen.

Gambar 3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan



Sumber: Kementerian Kesehatan RI

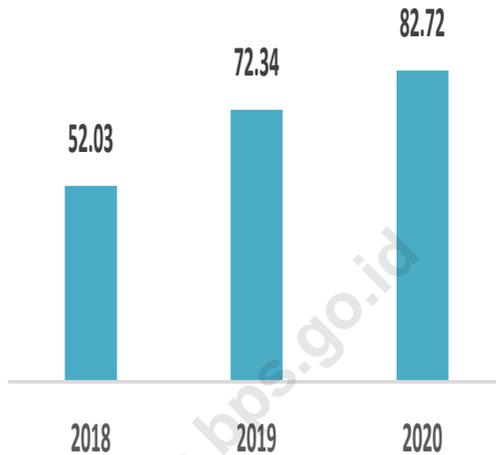
Gambar 3.4. Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Natuna, 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas



Gambar 3.5. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Natuna, 2018-2020

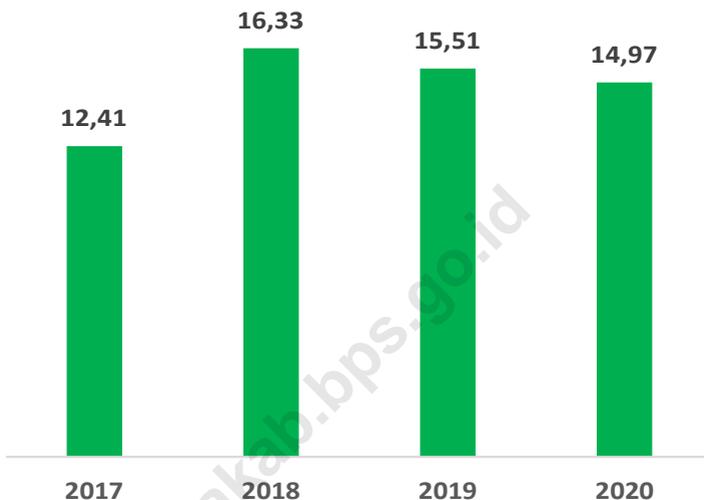


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Faktor berikut yang sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat yaitu perilaku sehat dan pelayanan kesehatan. Perilaku sehat diwakili dengan indikator perkawinan usia dini yang dapat beresiko kepada kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2020 persentase wanita pernah kawin dengan umur kawin pertama ≤ 16 tahun di Kabupaten Natuna sebesar 14,97 persen (Gambar. 3.6). Angka ini sudah mulai menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,51 persen. Sementara itu indikator pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan adalah siapa dan dimana proses penolong kelahiran. Pada tahun 2020, terdapat 9,94 persen wanita pernah kawin yang proses kelahiran terakhirnya bukan ditolong oleh tenaga medis. Angka tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 5,4 persen. Sama halnya dengan persentase wanita pernah kawin yang proses kelahiran terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2020 sebesar 31,14 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 36,26 persen.

Secara umum dapat dikatakan bahwa indikator-indikator kesehatan yang bisa berdampak terhadap peningkatan umur harapan hidup di masa pandemi COVID-19 masih menunjukkan ada perbaikan, akan tetapi perbaikannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pada akhirnya peningkatan UHH pada tahun 2020 juga turut melambat. Peningkatan UHH turut memberikan peran yang positif pada peningkatan IPM di masa pandemi.

Gambar 3.6. Wanita Pernah Kawin dengan Umur Kawin Pertama \leq 16 Kabupaten Natuna, 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

3.3. CAPAIAN DIMENSI PENGETAHUAN NATUNA

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Pembangunan manusia yang masih terus berlangsung hingga saat ini mencatat perkembangan yang menggembirakan. Akan tetapi, monitoring terhadap kinerja pembangunan di bidang pendidikan harus tetap dilakukan untuk memastikan kebijakan dan langkah ke depan.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.



Selama periode 2010 hingga 2020, HLS Kabupaten Natuna telah meningkat 1,57 tahun, sementara RLS meningkat 1,67 tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, HLS tahun 2020 masih tumbuh 0,07 persen, sedangkan RLS tumbuh 0,11 persen. Meningkatnya indikator ini menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

Gambar 3.7. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Natuna, 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020 harapan lama sekolah mencapai 13,90. Artinya, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I atau hampir selesai Diploma II. Sementara rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna 8,73 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Natuna usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara SLTP kelas II.

Di bidang pendidikan yang berkaitan langsung dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. Ketiga indikator ini berhubungan erat dengan harapan lama sekolah dalam jangka pendek. Sementara itu, ketiganya berhubungan dalam jangka panjang dengan rata-rata lama sekolah. Selain ketiga indikator tersebut, angka lulusan dan angka melanjutkan juga secara tidak langsung berhubungan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan

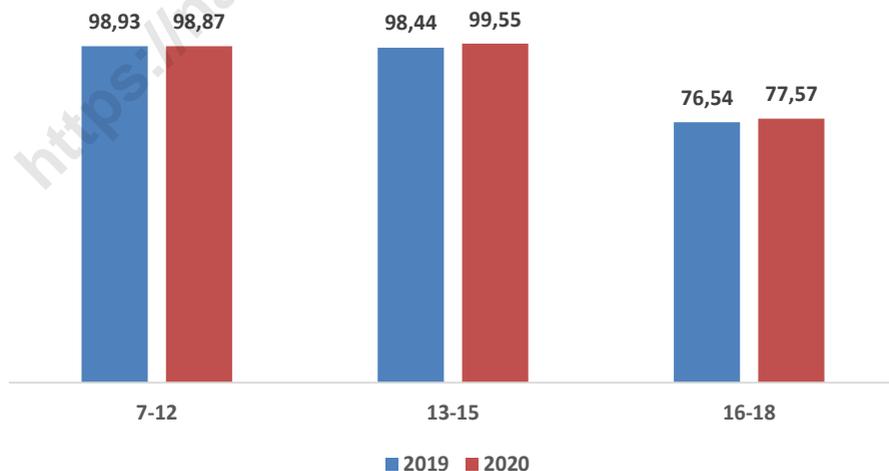
lama sekolah. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut secara bersama-sama harus dimonitor untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di seluruh kelompok umur pendidikan yaitu 7-12, 13-15, 16-18 tahun cukup baik selama tahun 2019-2020. Peningkatan tertinggi terjadi pada APS 16-18 tahun (1,34 persen), diikuti APS 13-15 tahun (1,13 persen), kemudian APS 7-12 tahun justru mengalami penurunan sebesar 0,06 persen. Artinya adalah peluang anak usia sekolah dalam mengakses pendidikan secara umum semakin besar. Dengan nilai APS mendekati 100 menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Angka partisipasi kasar mengalami penurunan seiring dengan naiknya jenjang pendidikan. Dalam dua tahun terakhir, angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat mengalami penurunan.

Begitu juga dengan angka partisipasi murni (APM) mengalami penurunan seiring dengan naiknya jenjang pendidikan. Dalam dua tahun terakhir, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat mengalami penurunan.

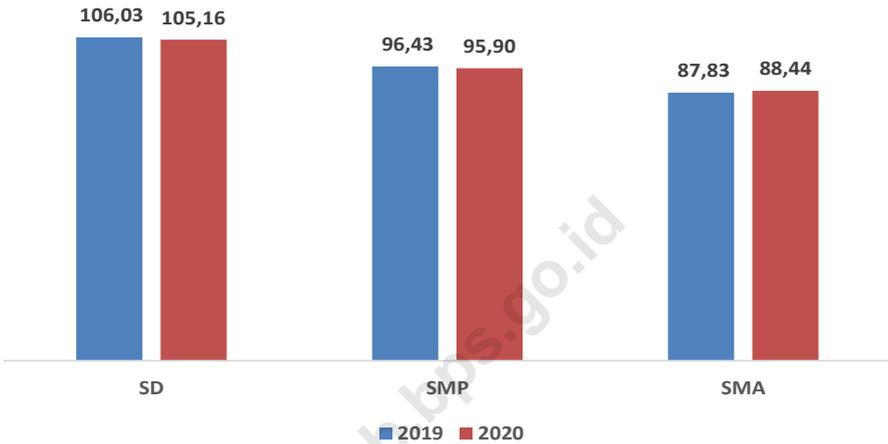
Gambar 3.8. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Natuna Menurut Kelompok Usia Sekolah 2019-2020 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

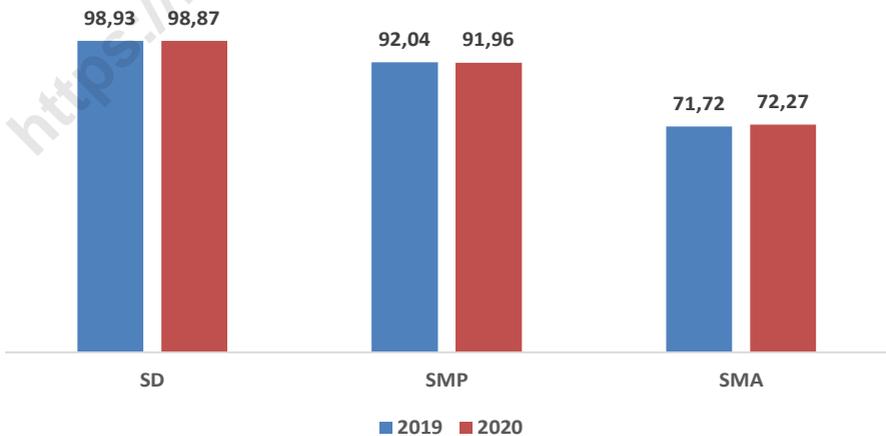


Gambar 3.9. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Natuna menurut Jenjang Pendidikan, 2019-2020 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Gambar 3.10. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Natuna menurut Jenjang Pendidikan, 2019-2020 (Persen)

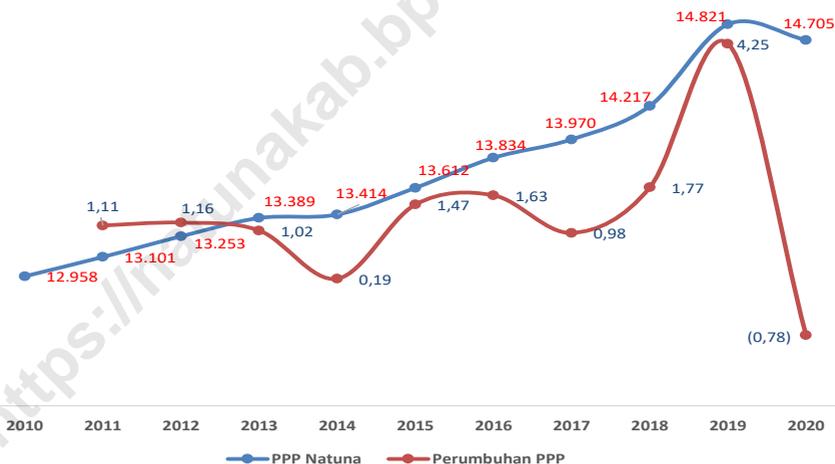


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

3.4. CAPAIAN STANDAR HIDUP LAYAK NATUNA

Indikator ekonomi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dalam penghitungan IPM adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Namun, indikator yang mencerminkan kesejahteraan bukan hanya itu saja ada beberapa indikator lain berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pengangguran terbuka (TPT), upah tenaga kerja, PDRB per kapita, gini rasio, kemiskinan, dan lain-lain.

Gambar 3.11. Perkembangan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Natuna, 2010-2020 (000 Rp)



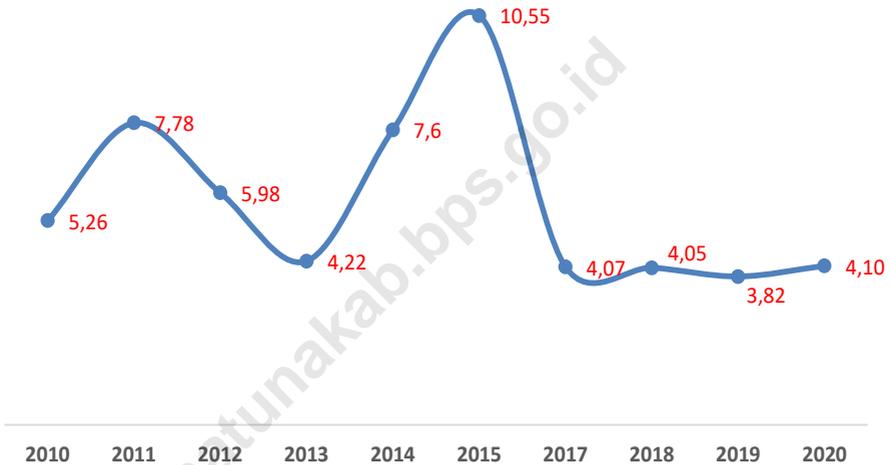
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat perkembangan selama sepuluh tahun terakhir TPT di Kabupaten Natuna cenderung mengalami penurunan. Ini menandakan bahwa masyarakat cenderung memiliki pendapatan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat pandemi COVID-19 muncul di tahun 2020 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan TPT. Pada tahun 2020 jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Natuna adalah 38.486 orang, bertambah sebanyak 2.036 orang dibandingkan tahun sebelumnya (36.450 orang), sedangkan angka TPT mencapai



4,10 persen, meningkat 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,82 persen. Hal ini akan berdampak pada hilangnya sumber pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga. Pada akhirnya, hal ini akan mengakibatkan menurunnya pengeluaran dan tingkat kesejahteraan.

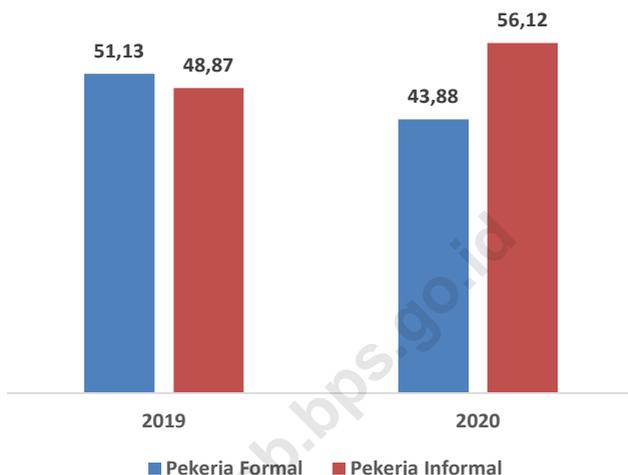
Gambar 3.12. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Natuna, 2010-2020 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

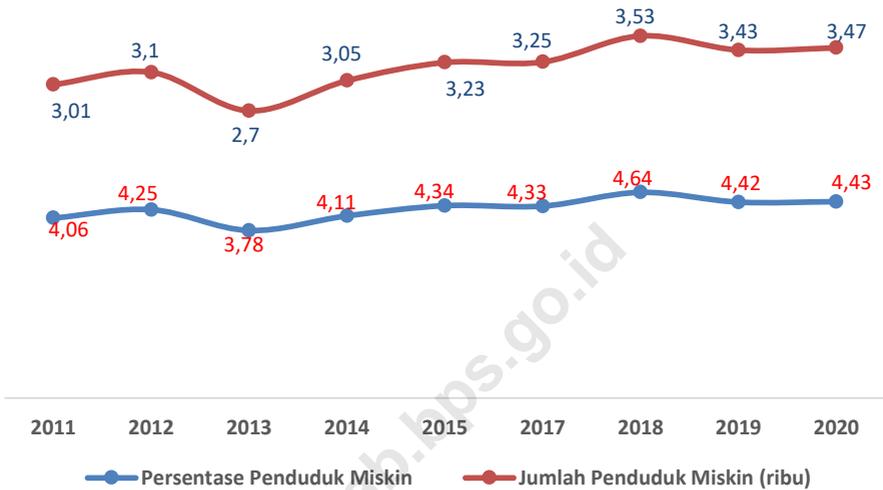
Pandemi COVID-19 juga menurunkan persentase pekerja formal dari 51,13 persen pada tahun 2019 menjadi 43,88 persen pada tahun 2020 yang di sisi lain meningkatkan persentase pekerja informal karena adanya kebutuhan untuk bertahan di masa pandemi yang salah satunya dilakukan dengan beradaptasi dan beralih menjadi pekerja informal.

Gambar 3.13. Status Pekerjaan Utama menurut Pekerja Formal dan Informal di Kabupaten Natuna, 2019-2020 (Pesen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan TPT di masa pandemi berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dan persentasenya mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di tahun 2020 sebesar 4,43 persen meningkat 0,01 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penduduk miskin dari 3,43 ribu barang menjadi 3,47 ribu orang.

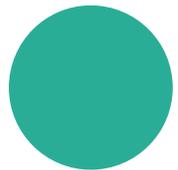
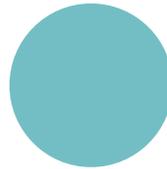
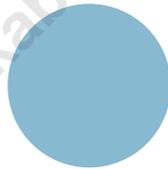
Gambar 3.14. Tren Kemiskinan di Kabupaten Natuna (persen), 2011-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan indikator yang menunjukkan kesejahteraan dan distribusinya. Gini rasio adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kedua indikator ini harus dimonitor bersamaan dengan pengeluaran per kapita untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang diambil telah sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gini rasio tahun 2019 sebesar 0,30 dan ditahun 2020 menjadi 0,34.

BAB 4

Kesimpulan



<https://natunakah.bps.go.id/>

BAB IV

KESIMPULAN

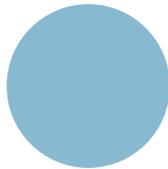
Dari hasil pengamatan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna didapat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pembangunan manusia di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Natuna Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Natuna telah mencapai 72,72. Angka ini meningkat sebesar 0,09 poin dibandingkan dengan IPM Kabupaten Natuna pada tahun 2019 yang sebesar 72,63.
2. Pada tahun 2020, pembangunan manusia di Kabupaten Natuna berstatus “tinggi”, sama dengan statusnya pada tahun 2019. IPM Kabupaten Natuna pada tahun 2020 tumbuh sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun 2019.
3. Komponen UHH. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 65,06 tahun, meningkat 0,39 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Komponen pendidikan yang tercermin dari HLS dan RLS. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,9 tahun, meningkat 0,07 tahun dibandingkan pada 2019. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,73 tahun, meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
5. Komponen ekonomi yang digambarkan oleh Pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2020 sebesar 14,705 juta rupiah, menurun 116 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

<https://natunakab.bps.go.id>



**Pustaka
dan
Lampiran**



PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Manusia 2020. Jakarta (ID). BPS.
- _____. (2021). Indeks Pembangunan Manusia 2020. Jakarta (ID). BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2020). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2020. Kepulauan Riau. BPS.
- _____. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau 2019. Kepulauan Riau. BPS.
- _____. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau 2020. Kepulauan Riau. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. 2021. Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021. Kabupaten Natuna: BPS
- _____. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna 2019. Kabupaten Natuna. BPS.
- _____. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna 2020. Kabupaten Natuna. BPS.
- Blum, Henrik L. (1974). Planning for Health. New York: Human science ress.
- United Nations Development Programme. 2019. Human Development Report 2019 New York: UNDP.

LAMPIRAN

Tabel L.1. Indikator Terkait Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten Natuna, 2019-2020

		2019	2020
Dimensi Umur Panjang dan Umur Sehat			
Angka Kesakitan	%	13.42	11.14
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	72.34	82.72
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	8.03	10.25
Wanita Pernah Kawin dengan Umur Kawin Pertama ≤ 16 tahun	%	15.51	14.97
Wanita Pernah Kawin yang Proses Melahirkan Terakhirnya Bukan Ditolong oleh Tenaga Medis	%	5.4	9.94
Wanita Pernah Kawin yang Proses Melahirkan Terakhirnya Bukan di Fasilitas Kesehatan	%	36.26	31.14
Dimensi Pengetahuan			
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	106.03	105.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	96.43	95.90
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	%	87.83	88.44
Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	98.93	98.87
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	92.04	91.96
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	%	71.72	72.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	%	98.93	98.87
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	%	98.44	99.55
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	%	76.54	77.57
Dimensi Standar Hidup Layak			
TPT	%	3.82	4.1
Penduduk Bekerja	%	36,450	38,486
Pekerja Formal	%	51.13	43.88
Pekerja Informal	%	48.87	56.12
Penduduk Miskin	%	4.42	4.43
Jumlah Penduduk Miskin	ribu rupiah	3.43	3.47
Gini Rasio		0.30	0.34

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas



CATATAN TEKNIS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran riil per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup layak.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Pengetahuan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel L1. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp1.007.436.



Tabel L.2. Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Perhitungan Paritas Daya Beli/Purchasing Power Parity (PPP)

Nama Komoditas	Nama Komoditas	Nama Komoditas	Nama Komoditas
(1)	(2)	(3)	(4)
Beras	Cabe rawit	Gado-gado/ketoprak	LPG
Tepung Terigu	Tahu	Nasi campur/rames	Minyak tanah
Ketela pohon/singkong	Tempe	Nasi goreng	Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk, dll)
Kentang	Jeruk	Nasi putih	Perlengkapan mandi
Tongkol/tuna/cakalang	Mangga	Lontong/Ketupat sayur	Barang kecantikan
Kembung	Salak	Soto/sop/gule/rawon/cincang	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
Bandeng	Pisang ambon	Sate/tongseng	Sabun cuci
Mujair	Pisang Raja	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Biaya RS pemerintah
Mas	Pisang lainnya	Makanan ringan anak	Biaya RS swasta
Lele	Pepaya	Ikan (goreng/bakar dll)	Puskesmas/pustu
Ikan segar lainnya	Minyak Kelapa	Ayam/daging (goreng dll)	Praktek dokter/poliklinik
Daging sapi	Minyak goreng lainnya	Makanan jadi lainnya	SPP
Daging ayam ras	Kelapa	Air kemasan galon	Bensin
Daging ayam kampung	Gula pasir	Minuman jadi lainnya	Transportasi/pengangkutan umum
Telur ayan ras	Teh	Es lainnya	Pos dan telekomunikasi
Susu kental manis	Kopi	Rokok kretek filter	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Susu bubuk	Garam	Rokok kretek tanpa filter	Pakaian jadi perempuan dewasa
Susu bubuk bayi	Kecap	Rokok putih	Pakaian jadi anak-anak
Bayam	Penyedap makanan/vetsin	Rumah sendiri/bebas sewa	Alas kaki
Kangkung	Mie instan	Rumah kontrak	Minyak pelumas
Kacang panjang	Roti manis/roti lainnya	Rumah Sewa	Meubelair
Bawang merah	Kue kering	Rumah dinas	Peralatan Rumah Tangga
Bawang putih	Kue basah	Listrik	Perlengkapan perabot rumah tangga
Cabe merah	Makanan gorengan	Air PAM	Alat-alat Dapur/Makan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

Jl. HR. Soebrantas, Sual,
RT 01 RW 05, Ranai, Bunguran Timur
<http://natunakab.bps.go.id>, E-mail: bps2103@bps.go.id

